

## **Peluang dan Tantangan Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Terhadap Implementasi Kebijakan Inklusi di Indonesia**

**Muhammad Rusly<sup>1</sup>, Anggun C Dmas Putri Bramuda<sup>1</sup>**  
<sup>1</sup>Universitas PGRI Palembang, Indonesia

Corresponding author e-mail: [ruslyy971pmr@gmail.com](mailto:ruslyy971pmr@gmail.com)

Article History: Received on 2 January 2024, Revised on 30 March 2024,  
Published on 21 April 2024

**Abstrak:** Respon masyarakat terhadap pendidikan inklusi sangatlah positif, tercermin dari peningkatan jumlah sekolah yang menerapkannya dan jumlah peserta didik yang meningkat secara signifikan, namun implementasi kebijakan inklusi di Indonesia masih belum memenuhi harapan. Artikel ini menggunakan metode *library research* dengan tujuan mengulas sumber-sumber rujukan relevan terkait peluang dan tantangan ABK terhadap implementasi kebijakan inklusi di Indonesia. Hasil yang diperoleh memiliki keragaman, hal ini disebabkan oleh perbedaan budaya, tradisi, dan pelaksanaannya di tingkat provinsi, kota hingga pada ranah sekolah dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Peluang yang didapat meliputi perubahan positif pada diri ABK, terpenuhinya tujuan UU sebagai panduan bagi Dinas Pendidikan dalam implementasi pendidikan inklusi, hingga diterimanya keberadaan ABK dalam lingkungan masyarakat. Sedangkan tantangannya meliputi kurangnya pengalaman para GPK, keterbatasan anggaran, dan kurangnya sarana prasarana standar di beberapa sekolah.

**Kata Kunci:** ABK, Inklusi, Integrasi, Kebijakan, Segregasi

**Abstract:** *The community's response to inclusive education is highly positive, reflected in the increasing number of schools implementing it and a significant rise in student enrollment. However, the implementation of inclusive policies in Indonesia has yet to meet expectations. This article utilizes a library research method aimed at reviewing relevant sources regarding opportunities and challenges for ABK in the implementation of inclusive policies in Indonesia. The results obtained are diverse, influenced by cultural differences, traditions, and implementation at the provincial, municipal, and school levels, from early PAUD to higher education. Opportunities include positive changes in ABK, the fulfillment of the objectives of the UU as guidance for the Education Department in implementing inclusive education, and the acceptance of ABK within the community. Meanwhile, challenges include the lack of experience among GPK, budget constraints, and inadequate standard facilities in some schools.*

**Keywords:** ABK, Inclusion, Integration, Policies, Segregation

## **A. Pendahuluan**

Setiap anak memiliki kemungkinan menghadapi kesulitan dalam pembelajaran, ada yang ringan dan dapat diatasi sendiri, namun ada pula yang cukup berat sehingga membutuhkan perhatian dan bantuan ekstra dari orang lain (Saputra, 2016). Hal ini telah menjadi permasalahan umum bagi pendidikan anak, khususnya Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). ABK merupakan anak yang memiliki karakteristik spesifik dan berbeda dari anak-anak pada umumnya, meliputi keterbatasan emosional, mental, atau fisik. Cakupan ABK berupa tunanetra, tunadaksa, tunarungu, dan tunagrahita (Putri *et al.*, 2024). Pertama, tunanetra. Tunanetra merupakan kondisi di mana seseorang mengalami keterbatasan penglihatan, baik sebagian (*low vision*) maupun total (buta), kondisi ini dapat berdampak pada kemandirian dalam aktivitas harian seperti berkomunikasi dan bergerak, mereka bergantung pada indera lain seperti pendengaran dan peraba untuk melakukan mobilitas (Hilpani & Hartono, 2024). Seseorang dikatakan sebagai tunanetra ialah ketika berbagai upaya telah dikerahkan untuk memperbaiki kemampuan visualnya, namun ketajaman pada visualnya tidak melebihi dari 20/200 atau 20 derajat (Tinggi, 2024). Kedua, tunadaksa. Tunadaksa merujuk kepada individu yang mengalami kelainan ortopedik atau gangguan fungsi normal pada otot, tulang, atau persendian yang disebabkan oleh faktor bawaan sejak lahir, kecelakaan, atau penyakit. Kondisi ini mengakibatkan hambatan dalam melakukan aktivitas, serta menimbulkan gangguan sosial, psikologis, budaya, dan memerlukan bantuan alat (Muhtar & Lengkana, 2019; Sari & Yendi, 2018; Felanni & Aviani, 2024). Ketiga, tunarungu. Rahmah (2018) menjelaskan bahwa yang dimaksud tunarungu ialah individu yang mengalami kendala dalam pendengaran, sehingga seringkali mereka juga mengalami kesulitan dalam berbicara, yang menghasilkan istilah tunawicara. Cara komunikasi yang umum digunakan oleh individu tunarungu dengan individu lainnya adalah melalui bahasa isyarat. Penggunaan abjad jari telah diakui secara internasional, namun setiap negara memiliki beragam macam bahasa isyarat yang berbeda. Keempat, tunagrahita. Rifki *et al.* (2024) menjelaskan bahwa tunagrahita adalah anak yang mengalami hambatan dalam perkembangan mental dan intelektual, yang dapat berpengaruh pada kemampuan kognitif dan perilakunya. Gejalanya meliputi kesulitan dalam fokus, kendala dalam mengatur emosi, kecenderungan untuk membatasi interaksi sosial, dan kecenderungan untuk menjadi pendiam.

Menurut Sudarto (2016), pendidikan untuk ABK di Indonesia masih belum mendapat perhatian yang memadai dan belum dapat ditangani secara optimal hingga saat ini. ABK memang memiliki perbedaan dengan anak-anak normal secara umum, baik dalam hal fisik, intelektual, mental, maupun sosial. Hingga kini, masih banyak masyarakat yang menganggap bahwa ABK tidak pantas

untuk berada di ruang publik. Sebagai warga negara, mereka memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara lainnya, termasuk hak yang sama dalam mendapatkan pendidikan. Pendidikan diartikan sebagai kebutuhan esensial yang vital bagi manusia karena melalui proses ini, pengetahuan dapat dialirkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran dan pelatihan (Latifah, 2020). Pendidikan merupakan upaya untuk mengembangkan diri dan menciptakan pola pikir sistematis melalui proses pengkreasian dan pembangunan diri. Umumnya, unsur-unsur pendidikan seperti mendidik, mengajar, dan melatih merupakan sumber perubahan dan pertumbuhan yang membantu seseorang meningkatkan kesejahteraan sepanjang hayat.

Pasal 32 ayat 1 dari Undang-undang Dasar (UUD) Tahun 1945 menegaskan hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, sementara pasal 5 ayat 1 dari Undang-undang (UU) Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Undang-undang tersebut menjadi bukti konkret keberadaan pendidikan inklusi dalam masyarakat. Hajar & Mulyani (2017) menginformasikan bahwa, sebelum pendidikan inklusi diperkenalkan, sejarah awal penyelenggaraan pendidikan untuk ABK dimulai dengan pendidikan khusus terpisah, yang dikenal sebagai segregasi. Latifah (2020) menjelaskan bahwa pendidikan segregasi muncul karena adanya keyakinan bahwa ABK memiliki perbedaan yang membuat mereka tidak sama dengan anak-anak normal pada umumnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran akan kemampuan anak-anak berkebutuhan khusus jika mereka disatukan dengan anak-anak normal pada umumnya. Dalam pandangan ini, ABK seharusnya menerima layanan pendidikan yang terpisah dari anak-anak normal. Pendidikan segregasi kemudian dianggap memiliki unsur diskriminatif terutama di Indonesia, dalam hal ini mendorong penggunaan konsep pendidikan terpadu yang dikenal sebagai integrasi (Sumarni & Supriyanto, 2013).

Pendidikan integrasi adalah layanan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada ABK untuk belajar bersama dengan anak-anak normal dengan menyusun program-program khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka (Simorangkir, 2022). Widiastuti (2020) menyatakan bahwa sistem pendidikan integrasi adalah sistem pendidikan yang memasukkan anak-anak yang mengalami gangguan emosi dan perilaku ke dalam lingkungan yang sama dengan anak-anak normal. Integrasi ini dapat dilakukan secara menyeluruh, parsial, atau terpadu untuk meningkatkan proses sosialisasi. Batas maksimum ABK dengan gangguan emosi dan perilaku dalam satu kelas adalah 10% dari total jumlah peserta didik. Hal inilah yang melatarbelakangi hadirnya pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi berupaya menjadi jembatan antara pendidikan segregasi dan integrasi, di mana ABK tidak hanya memiliki

kesempatan untuk mengembangkan potensinya, tetapi juga mendapatkan layanan yang sesuai dengan keterbatasan yang dimilikinya agar dapat mencapai potensi optimal (Hajar & Mulyani, 2017).

Pendidikan inklusi merupakan program sekolah yang mengarah pada kolaborasi antara anak normal dan ABK dalam lingkungan maupun layanan pendidikan serupa, kolaborasi ini diyakini akan memberikan dampak positif yang konstruktif dan efektif dalam proses integrasi mereka dalam kehidupan sekolah dan di luar lingkungan sekolah (Romadhon *et al.*, 2021). Pendidikan inklusi bertujuan untuk memodifikasi sistem pendidikan dengan menghapuskan segala rintangan yang menghambat keterlibatan penuh setiap anak dalam proses pendidikan (Alfikri *et al.*, 2022). Pendidikan inklusi dianggap sebagai usaha untuk memasukkan anak-anak berkebutuhan khusus ke dalam sekolah reguler dengan tujuan memberikan hak pendidikan kepada semua anak, mempermudah akses ke pendidikan, dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi (Munajah *et al.*, 2021). Walaupun sulit untuk didefinisikan dengan tepat, pendidikan inklusi secara umum dapat diinterpretasikan sebagai penciptaan lingkungan belajar yang memperhatikan kebutuhan pendidikan dari semua anak, tanpa memandang faktor-faktor seperti ras, latar belakang sosial ekonomi, jenis kelamin, kecacatan, dan lainnya (Sharma *et al.*, 2019).

Isu-isu pendidikan khususnya inklusi di Indonesia tidak bisa diatasi oleh masyarakat sendiri, sehingga perlu ditangani oleh pemerintah melalui kebijakan publik. Kebijakan publik adalah kebijakan yang dirancang oleh pemerintah sebagai penentu kebijakan, yang berisi instruksi tentang tindakan-tindakan yang harus dilakukan oleh berbagai kelompok yang memiliki kepentingan dalam mencapai tujuan tertentu dalam masyarakat (Haitao & Ali, 2021). Tahap implementasi kebijakan merupakan fase krusial dalam proses kebijakan. Meskipun kebijakan telah direncanakan dengan baik, jika proses implementasinya tidak efektif oleh para pelaksana, kebijakan tersebut berisiko mengalami kegagalan. Sejak dikeluarkannya Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdiknas No.380/C.C6/MN/2003 pada tanggal 20 Januari 2003, Indonesia telah mulai menggalakkan pendidikan inklusi. Langkah ini kemudian diperkuat dengan penerbitan Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi untuk peserta didik yang memiliki kelainan serta menunjukkan potensi kecerdasan luar biasa.

Lukitasari *et al.* (2017) menyatakan bahwa respon masyarakat terhadap pendidikan inklusi sangatlah positif, terlihat dari peningkatan jumlah sekolah yang menerapkan inklusi dan jumlah peserta didiknya yang secara signifikan mengalami peningkatan. Meskipun demikian, pelaksanaannya di lapangan masih jauh dari harapan, terutama karena kurangnya komitmen dan dukungan dari pemerintah. Oleh karena itu, dalam artikel ini penulis tertarik untuk mengulas mengenai peluang dan tantangan ABK terhadap implementasi

kebijakan inklusi di Indonesia.

## **B. Metode Penelitian**

Artikel *review* ini dibuat dengan melakukan penelusuran melalui berbagai sumber pustaka sebagai metode penulisannya, yang umumnya dikenal sebagai studi literatur atau *library research* tanpa melalui pengamatan langsung di lapangan, namun dengan menyebutkan setiap sumber-sumber setiap kali mensitasinya. Metode ini bertujuan untuk mengevaluasi berbagai referensi yang relevan dengan topik mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi oleh ABK dalam implementasi kebijakan inklusi di Indonesia. Hasil yang diperoleh berupa data sekunder yang berasal dari berbagai sumber literatur baik nasional maupun internasional yang dipublikasikan dalam 10 tahun terakhir pada Mendeley, Google Scholar, dan database lainnya. Data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan dari penelitian sebelumnya (Widhi *et al.*, 2021), kemudian diubah dan disusun menjadi inti penelitian terkait. Informasi ini kemudian dapat dimanfaatkan oleh peneliti berikutnya sebagai suatu sumber keterbaruan.

Artikel ini menitikberatkan pada analisis deskriptif. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Irvan & Admoko (2020), analisis deskriptif merupakan langkah-langkah untuk menjelaskan data secara detail, kemudian dievaluasi dan dibahas agar informasi yang terungkap bisa dipahami secara lebih jelas. Metode pengumpulan data yang digunakan pada penulisan artikel ini ialah metode dokumentasi dengan pendekatan naratif yang hasil ekstraksinya disatukan kemudian dikelompokkan berdasarkan kesamaan untuk menjawab setiap permasalahan yang telah berhasil dirumuskan hingga kemudian mengalami proses analisis.

Hasil analisis yang memenuhi kriteria selanjutnya dikumpul dan disusun menjadi artikel jurnal ilmiah yang koheren. Artikel jurnal ilmiah yang koheren mengacu pada artikel jurnal yang memiliki kelogisan dan keselarasan dalam presentasi informasi dan argumentasi di dalamnya. Ini berarti bahwa artikel-artikel di dalam jurnal tersebut saling terkait dan menyajikan informasi dengan cara yang jelas dan terstruktur, sehingga memudahkan pembaca untuk memahami isi dan pesan yang disampaikan. Inilah yang diharapkan penulis pada artikel *review* ini.

## **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Implementasi pendidikan inklusi di berbagai negara sangatlah beragam, hal ini disebabkan oleh perbedaan budaya, tradisi, dan pelaksanaannya di tingkat provinsi, kota hingga pada ranah sekolah (Darma & Rusyidi, 2015). Di Indonesia, meskipun perkembangan pendidikan inklusi telah menimbulkan

kegembiraan dan mendapat penghargaan serta dukungan dari berbagai pihak terutama praktisi pendidikan, namun dalam pelaksanaannya di lapangan masih menghadapi sejumlah isu dan tantangan (Tanjung *et al.*, 2022).

Dalam penelitian Sulistyadi (2014) yang dipublikasikan pada Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik bertujuan untuk mengevaluasi cara implementasi atau penerapan layanan pendidikan inklusi di Kabupaten Sidoarjo, dan juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan proses tersebut. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Kabupaten Sidoarjo berjalan sesuai harapan. Sekolah reguler yang menyediakan pendidikan inklusi memberikan alternatif yang lebih terjangkau bagi penyandang disabilitas. Secara umum, penyandang disabilitas dijelaskan oleh Masnoni *et al.* (2024) sebagai individu yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik dalam jangka waktu yang panjang. Mereka sering mengalami hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan dan memiliki tantangan dalam beradaptasi dengan sekitarnya. Penelitian tersebut menginformasikan bahwa Kabupaten ini telah menetapkan sistem pendidikan inklusi sejak 2009, dengan komitmen dari Dinas Pendidikan Sidoarjo yang kuat. Meskipun demikian, masih ada beberapa kendala yang dihadapi, seperti kurangnya pemahaman implementor tentang pedoman teknis, kurangnya pengalaman para guru pendamping khusus (GPK), keterbatasan anggaran, kurangnya sarana prasarana standar di beberapa sekolah, dan kurangnya insentif bagi para guru reguler yang menjadi GPK. Meski demikian, komitmen para GPK tetap tinggi karena didorong oleh rasa kemanusiaan dan empati terhadap anak-anak berkebutuhan khusus.

Fuadi, (2015) melakukan penelitian yang dipublikasikan pada HIKMAH: *Journal of Islamic Studies* bertujuan untuk menjelaskan kebijakan dan pelaksanaan pendidikan inklusi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Berdasarkan temuan penelitian, disimpulkan bahwa: pertama, pendidikan inklusi di Provinsi DKI Jakarta cenderung menggabungkan anak-anak dengan kebutuhan khusus ke dalam program sekolah, meskipun siswa dengan kecerdasan atau bakat istimewa juga dimasukkan namun tidak menjadi fokus utama. Kedua, pendidikan inklusi di sana tidak mengadopsi model-model yang umumnya terdapat dalam literatur atau ketentuan pendidikan inklusi, melainkan hanya dianggap sebagai bagian dari strategi yang harus dipahami dan diterapkan oleh guru. Ketiga, tidak semua kategori ABK dapat diterima dalam program pendidikan inklusi karena keterbatasan sumber daya sekolah. Keempat, jumlah sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di Provinsi DKI Jakarta melebihi ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Kelima, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selalu berkolaborasi dengan sekolah dengan menyediakan pelatihan bagi guru-guru inklusi, bantuan finansial, sarana dan prasarana, serta beasiswa bagi sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusi.

Penelitian yang dilakukan Lubis (2016) dipublikasikan pada Jurnal Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan pendidikan inklusi tingkat SD di Kota Yogyakarta dengan fokus pada struktur birokrasi, komunikasi, sumberdaya, lingkungan kebijakan, dan karakteristik masalah. Selain itu, juga diteliti faktor pendukung dan penghambat dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi serta bagaimana memanfaatkan faktor pendukung dan menemukan solusi untuk faktor penghambat tersebut. Hasil penelitian memberikan informasi bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi di SD Kota Yogyakarta sebagian besar memiliki program kerja yang baik pada 12 sekolah, 10 sekolah menyediakan layanan cukup baik, dan 9 sekolah memberikan layanan tes psikologi dengan cukup baik. Meskipun demikian, masih ada ruang untuk peningkatan dalam modifikasi kurikulum, pembelajaran, dan penilaian. Lingkungan kebijakan mendapat dukungan dari berbagai pihak, sementara masalah terkait sarana prasarana dan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi kendala utama. Faktor pendukung mencakup dukungan dari warga sekolah dan pihak luar, sementara faktor penghambat meliputi pemahaman yang kurang optimal terhadap konsep pendidikan inklusi, kekurangan GPK, dan ketersediaan sarana prasarana serta bahan ajar yang belum memadai. Pemanfaatan faktor pendukung dijadikan sebagai upaya untuk mendukung kelancaran pendidikan inklusi sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan, sementara solusi untuk faktor penghambat mencakup rapat, sosialisasi, pelatihan, dan bantuan dari Dinas Pendidikan.

Tahun yang sama, Sartica & Ismanto (2016) melakukan penelitian yang dipublikasikan pada KELOLA: Jurnal Manajemen Pendidikan bertujuan mengevaluasi penyelenggaraan program pendidikan inklusi di Kota Palangka Raya. Temuan dari penelitian tersebut menyimpulkan bahwa dalam aspek konteks, pelaksanaan program pendidikan inklusi di Kota Palangka Raya bertujuan untuk mengatasi kebutuhan yang belum terpenuhi, terutama permintaan orang tua ABK untuk menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah biasa atau reguler. Dari segi *input*, implementasi program ini di tiga sekolah menunjukkan bahwa sarana dan prasarana umum sudah memadai untuk semua peserta didik, meskipun masih kurangnya fasilitas khusus untuk ABK. Secara finansial, dukungan untuk program ini cukup kuat melalui alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), beasiswa, dan anggaran daerah. Namun, ketiga sekolah belum memiliki GPK, sehingga ABK ditangani oleh guru biasa. Dalam evaluasi proses, baru kali ini Dinas terkait melakukan pengawasan terhadap sekolah, sementara kompetensi guru dalam memberikan layanan individu dinilai memadai. Namun, masih ada beberapa kendala seperti ketiadaan GPK, kurangnya fasilitas khusus, dan kurangnya pelatihan khusus bagi guru. Dari segi hasil, dampak program ini tercermin pada pencapaian prestasi ABK dan jumlah ABK yang terlayani, meskipun ada variasi jumlah ABK

yang terlayani di masing-masing sekolah.

Penelitian Pramudiana (2017) yang dipublikasikan pada Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran bertujuan menjelaskan dan menganalisis pelaksanaan (implementasi) kebijakan pendidikan inklusi bagi ABK di Surabaya. Dalam penelitian tersebut, menginformasikan bahwa saat ini kota Surabaya telah menunjuk total 262 sekolah sebagai penyelenggara pendidikan inklusi, dengan rincian 168 Sekolah Dasar (SD), 90 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 2 Sekolah Menengah Atas (SMA), dan 2 Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), tersebar di seluruh wilayahnya. Meskipun jumlah sekolah inklusi di SMA dan SMK relatif sedikit dibandingkan dengan SD dan SMP yang menerapkan pendidikan inklusi, namun jika dibandingkan dengan total sekolah negeri di Kota Surabaya, jumlah sekolah yang sudah ditunjuk sebagai penyelenggara pendidikan inklusi masih tergolong rendah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pendidikan inklusi di Surabaya menyoroti peran utama sekolah dalam membentuk siswa ABK, tetapi membutuhkan dukungan luas. Namun, dukungan dari orang tua, pemerintah, tenaga ahli, sekolah khusus, perguruan tinggi, dan Sekolah Luar Biasa (SLB) masih kurang. Sarana sekolah masih terbatas, sementara keterlibatan orang tua dalam pendidikan inklusi masih rendah, menyebabkan kurangnya perhatian terhadap anak. Permasalahan selanjutnya yang ditemui dalam pendidikan inklusi di Surabaya meliputi protes terhadap kenaikan kelas ABK, kekurangan guru khusus, tantangan untuk inovasi melalui kolaborasi, kendala praktis termasuk kondisi geografis, sarana-prasarana, kondisi keuangan, dan stigma negatif masyarakat terhadap ABK. Sekolah perlu memperkuat kerjasama antar guru dan komunikasi dengan orang tua, meskipun ini menambah beban kerja.

Windarsih *et al.* (2017) dalam penelitiannya yang dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah P2M STKIP Siliwangi bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengevaluasi bagaimana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang inklusi di kota Cimahi, Jawa Barat dijalankan dan diimplementasikan. Penelitian tersebut memberikan informasi bahwa kehadiran pendidikan inklusi pada PAUD adalah respon terhadap pemenuhan hak PAUD dengan kebutuhan ABK. Keberhasilan pelaksanaan pendidikan inklusi tergantung pada kepatuhan sekolah terhadap peraturan yang berlaku. Misalnya di TK BPK Penabur, pembelajaran PAUD inklusi telah dijalankan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan Pemerintah Kota Cimahi. Pelaksanaannya mengedepankan nilai-nilai pluralisme, humanisme, dan menghormati Hak Asasi Manusia (HAM). Manajemen PAUD yang dilakukan menggunakan pendekatan manajemen berbasis sekolah. Namun, ada beberapa hambatan yang dihadapi, seperti kekurangan sarana dan prasarana yang baik karena pemerintah hanya memberikan isyarat untuk menerima PAUD inklusi tanpa menyediakan fasilitas yang memadai. Belum ada kelas khusus untuk anak

inklusi usia dini, yang menyebabkan mereka terkadang merasa tidak nyaman dalam interaksi dengan teman sebaya yang normal. Fasilitas pendukung untuk PAUD inklusi, seperti permainan edukatif khusus, juga masih sangat terbatas. Program optimalisasi belum berjalan secara maksimal, meskipun guru sudah cukup baik dalam persiapannya.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hananto & Lituhayu (2018) yang dipublikasikan pada *Journal of Public Policy and Manajement Review* bertujuan untuk mengevaluasi dampak dari pelaksanaan pendidikan inklusi tingkat SMP di Kota Pekalongan serta mengidentifikasi hambatan yang mungkin terjadi dalam implementasinya. Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut memberikan informasi bahwa pendidikan inklusi berpeluang dan berdampak pada individu ABK itu sendiri, meliputi terjadinya perubahan perilaku, dapat mengikuti pembelajaran untuk mencapai kemandirian, memberikan peluang untuk sekolah di lingkungan inklusi, dan terjadinya perubahan dalam interaksi ABK. Selanjutnya berdampak pula pada organisasi, meliputi terpenuhinya tujuan UU sebagai panduan bagi Dinas Pendidikan Kota Pekalongan dalam implementasi pendidikan inklusi tingkat SMP, guru-guru mengalami perubahan dalam metode pengajaran, dan terwujudnya visi dan misi pendidikan inklusi tingkat SMP di Kota Pekalongan. Selain itu juga berdampak pada masyarakat, meliputi perubahan pola pikir masyarakat tentang ABK, diterimanya keberadaan ABK dalam lingkungan masyarakat, dan memudahkan keluarga yang memiliki ABK untuk menyekolahkan mereka di sekolah inklusi. Tantangan yang ditemui dalam implementasi penelitian tersebut meliputi kurangnya ketersediaan GPK yang mempengaruhi kegiatan pembelajaran ABK, perlu adanya modifikasi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan ABK, keterbatasan sarana dan prasarana, kurangnya pelatihan bagi guru reguler yang mengajar di sekolah inklusi, ketergantungan pada GPK dari SLB yang dapat menghambat proses pembelajaran ABK, dan terbatasnya jenis kebutuhan khusus peserta didik yang diterima, karena hanya berfokus pada tunagrahita.

Rahmania (2018) telah berhasil melakukan penelitian yang kemudian dipublikasikan dalam *Repository Universitas Brawijaya* dengan tujuan untuk mengulas pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi di perguruan tinggi (Studi pada Pusat Studi Layanan Disabilitas (PSLD) Universitas Brawijaya). Temuan dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusi di Universitas Brawijaya telah berjalan dengan baik. Dalam struktur birokrasi PSLD, implementasinya sudah sesuai dengan tupoksinya masing-masing, tanpa ada tumpang tindih dalam pekerjaan. Terdapat kesediaan dari pelaksana untuk meningkatkan pelayanan melalui program-program yang mendukung pendidikan inklusi. Komunikasi, baik internal maupun eksternal PSLD, berjalan dengan baik. SDM baik dari segi kualitas maupun kuantitas, mengalami peningkatan kapasitasnya. Pengelolaan anggaran di PSLD dinilai sudah memadai untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa difabel atau ABK. Meskipun demikian, fasilitas

fisik belum sepenuhnya bersifat inklusi, namun fasilitas pendukung belajar bagi mahasiswa sudah cukup terpenuhi. Tantangan utama yang dihadapi adalah kesadaran terhadap mahasiswa difabel, diikuti oleh keterbatasan anggaran untuk menyediakan fasilitas inklusi. Diperlukan peningkatan kapasitas pendamping dan dosen melalui pelatihan serta peningkatan sarana dan prasarana yang inklusi. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut dilakukan melalui peningkatan program kerja, pelatihan untuk pendamping dan dosen, serta penyediaan fasilitas yang mendukung inklusi.

Tahun berikutnya, Wijaya (2021) melakukan penelitian yang dipublikasikan pada *Repository Universitas Negeri Jakarta* bertujuan untuk menggambarkan efektivitas dan evaluasi program pendidikan inklusi di SD Negeri 30 Palembang melalui analisis konteks, *input*, proses, dan produk program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi konteks belum memenuhi kebutuhan dan tujuan program secara kuat. Terdapat kelemahan dalam menganalisis kebutuhan program oleh penyelenggara maupun pelaksana. Evaluasi *input* menunjukkan ketidaksesuaian dengan komponen penyelenggaraan pendidikan inklusi. Sementara itu, evaluasi proses menunjukkan sebagian implementasi telah sesuai dengan konsep sekolah ramah anak, terutama dalam pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM). Namun, evaluasi produk menunjukkan perlunya perbaikan serius mulai dari perencanaan, pengawasan, dan pelaporan program. Secara keseluruhan, evaluasi program pendidikan inklusi di SD Negeri 30 Palembang belum sepenuhnya sesuai dengan pedoman umum perencanaan dan pelaporan program pendidikan inklusi. Meskipun demikian, pada aspek pelaksanaan KBM, sekolah telah memenuhi syarat sebagai sekolah ramah anak.

Salehuddin *et al.* (2023) berhasil melakukan penelitian yang telah dipublikasikan pada *Jurnal Pendidikan Sosiologi* dengan tujuan untuk menginvestigasi korelasi antara pendidikan inklusi dan dinamika budaya di Papua. Penelitian ini mengangkat isu inklusi pendidikan di Papua, terutama dalam hal aksesibilitas pendidikan formal di daerah pedalaman yang terpencil. Faktor utama yang terlibat mencakup kekurangan infrastruktur, transportasi, dan tenaga pendidikan, menunjukkan perlunya fokus khusus pada upaya memenuhi kebutuhan pendidikan di daerah yang sulit dijangkau. Selain itu, penelitian ini menekankan peran penting kearifan lokal dalam mempertahankan identitas budaya Papua. Temuan penting lainnya menyoroti pentingnya mengintegrasikan elemen budaya lokal dalam kurikulum pendidikan, termasuk bahasa, tradisi, dan nilai-nilai lokal. Pelatihan bagi guru diperlukan agar mereka dapat menjadi fasilitator inklusi yang mampu menggabungkan kekayaan budaya dalam proses pembelajaran, menciptakan lingkungan di mana setiap siswa merasa diakui dan dihargai sebagai individu yang independen dan setara.

Belakangan ini, Kaltsum & Komariyah (2024) telah melakukan penelitian yang

dipublikasikan dalam JMPIS: Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial dengan tujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang menghalangi implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SMP Negeri Kota Sangatta. Temuan dari penelitian tersebut mengindikasikan bahwa faktor-faktor yang menghambat implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SMP Negeri Kota Sangatta meliputi kekurangan guru pendamping khusus, keterbatasan aksesibilitas sarana prasarana, dan absennya penetapan kuota bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus (PDBK) saat Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Upaya yang disarankan untuk mengatasi tantangan ini melibatkan dukungan dan peran aktif dari pemerintah daerah dan kepala sekolah, seperti menyediakan guru pendamping khusus melalui penugasan GPK atau perekrutan Aparatur Sipil Negara (ASN), alokasi anggaran yang proporsional, serta penetapan kuota khusus bagi PDBK dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memastikan pemenuhannya.

Implementasi kebijakan pendidikan inklusi di Indonesia masih dianggap kurang, menurut Pratiwi *et al.* (2022) ada beberapa faktor yang dapat memicu hal tersebut, diantaranya pendidikan, kurikulum, fasilitas, dan kesulitan ABK untuk berintegrasi dengan teman-temannya. Mentalitas yang rendah terhadap pendidikan inklusi juga disebabkan oleh pandangan negatif dari orang tua dan masyarakat serta kurangnya dukungan dari sekolah. Oleh karena itu, diperlukan solusi seperti peningkatan jumlah GPK yang berlatar belakang dari lulusan Pendidikan Luar Biasa (PLB), peningkatan fasilitas pendukung pembelajaran, dan implementasi pendidikan inklusi oleh pemerintah untuk memfasilitasi dan memberikan hak kepada ABK yang jumlahnya semakin meningkat setiap tahunnya. Keberhasilan pendidikan inklusi melibatkan banyak pihak, termasuk komunitas sekolah, orang tua, siswa, tim administratif, dan pemerintah. Fokus utama harus diberikan pada peningkatan pemahaman dan kompetensi guru, karena mereka memegang peranan penting dalam pelaksanaan pendidikan.

#### **D. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah disajikan, dapat disimpulkan bahwa peluang bagi ABK terhadap implementasi kebijakan inklusi di Indonesia mencakup beberapa aspek, meliputi kemungkinan untuk mengalami kemajuan dalam pendidikan inklusi sesuai dengan arahan kebijakan yang telah ditetapkan, terdapat potensi perubahan perilaku yang dapat membantu ABK mengikuti pembelajaran untuk mencapai kemandirian, kesempatan ABK untuk bersekolah di lingkungan inklusi, pemenuhan tujuan UU sebagai panduan bagi Dinas Pendidikan, perubahan pola pikir masyarakat tentang ABK, diterimanya keberadaan ABK dalam lingkungan masyarakat, dan memudahkan keluarga yang memiliki ABK untuk menyekolahkan mereka di sekolah inklusi. Adapun tantangan yang dihadapi meliputi kurangnya sarana prasarana, hambatan interaksi dan adaptasi dengan lingkungan, kekurangan GPK, keterbatasan

anggaran, dan kebutuhan modifikasi kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan ABK. Meskipun demikian, implementasi kebijakan inklusi pendidikan di Indonesia masih dianggap belum memadai karena beberapa faktor seperti pendidikan, kurikulum, fasilitas, dan kesulitan ABK untuk bergabung dengan teman sebaya. Untuk mengatasi tantangan ini, dibutuhkan kerjasama antara pemerintah, kepala sekolah, orang tua, dan masyarakat. Upaya seperti memberikan pelatihan kepada para guru sebagai fasilitator inklusi dapat meningkatkan pelaksanaan dan perencanaan pembelajaran khusus untuk ABK, serta menciptakan lingkungan di mana mereka merasa diakui dan dihargai. Penulis menyarankan untuk mengumpulkan lebih banyak sumber-sumber literatur yang relevan, menganalisis implementasi kebijakan inklusi ABK secara global, dan melakukan penelitian langsung di lapangan untuk studi mendatang.

#### **E. Ucapan Terima Kasih**

Penulis sampaikan rasa syukur kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa. Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan artikel ini, kepada para peneliti yang telah berbagi pengetahuan dan memberikan akses kepada penulis untuk mengutip artikel-artikel jurnalnya sebagai referensi dalam penyelesaian artikel ini. Tak lupa, penulis sampaikan terima kasih pula kepada keluarga, guru, dan teman-teman yang memberikan dukungan moral ataupun semangat selama proses penulisan artikel ini. Penulis menyadari bahwa artikel ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Semoga artikel ini dapat memberikan manfaat dan memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan di masa depan.

#### **Daftar Pustaka**

- Alfikri, F., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Journal of Syntax Literate*, 7(6).
- Darma, I. P., & Rusyidi, B. (2015). Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Indonesia. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2).
- Felanni, C. R., & Aviani, Y. I. (2024). Resiliensi pada Tunadaksa Non Bawaan. *Jurnal Anestesi*, 2(1), 62-70.
- Fuadi, K. (2015). Analisis Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif di Provinsi Jakarta. *Hikmah: Journal of Islamic Studies*, 11(2), 1-30.
- Haitao, N., & Ali, H. (2021). The Role of Banking and Government Policy on the Economic Sector During the COVID-19 Pandemic. *Dinasti International Journal of Digital Business Management*, 3(1), 161-169.
- Hajar, S., & Mulyani, M. G. S. R. (2017). Analisis Kajian Teoritis Perbedaan,

- Persamaan dan Inklusi Dalam Pelayanan Pendidikan Dasar Bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). *Jurnal Mitra Suara Ganesha*, 4(2).
- Hananto, Y., & Lituhayu, D. (2018). Evaluasi Dampak Kebijakan Sistem Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Jenjang SMP di Kota Pekalongan. *Journal of Public Policy and Management Review*, 7(2), 490–501.
- Hilpani, M. S., & Hartono, R. (2024). Gedung Olahraga Penyandang Tunanetra pada Kawasan Komplek Pertuni Banjarbaru. *Jurnal Tugas Akhir Mahasiswa Lanting*, 13(1), 227–234.
- Irvan, A., & Admoko, S. (2020). Analisis Kemampuan Argumentasi Ilmiah Siswa Berbasis Pola Toulmin's Argument Pattern (Tap) Menggunakan Model Argument Driven Inquiry dan Diskusi Pada Pembelajaran Fisika SMA. *Inovasi Pendidikan Fisika*, 9(03), 318–324.
- Kaltsum, K. F. U., & Komariyah, L. (2024). Hambatan dalam Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Inklusif di SMP Negeri Kota Sangatta dan Solusi untuk Mengatasinya. *Jurnal Manajemen Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 5(2), 127–137.
- Latifah, I. (2020). Pendidikan Segregasi, Mainstreaming, Integrasi dan Inklusi, Apa Bedanya?. *Jurnal Pendidikan*, 29(2), 101–108.
- Lubis, E. N. (2016). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Jenjang SD se-Kota Yogyakarta. *Spektrum Analisis Kebijakan Pendidikan*, 5(2), 149–160.
- Lukitasari, S. W., Sulasmono, B. S., & Iriani, A. (2017). Evaluasi Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 4(2), 121–134.
- Masnoni, M., Wijaya, R., Pebriansyah, Y., Sumarno, S., Campos, E., & Munthe, T. E. (2024). Kerentanan Anak Penyandang Disabilitas Menjadi Korban. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(3), 1066–1071.
- Muhtar, T., & Lengkana, A. S. (2019). *Pendidikan Jasmani dan Olahraga Adaptif*. UPI Sumedang Press.
- Munajah, R., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(3), 1183–1190.
- Pramudiana, I. D. (2017). Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif untuk ABK di Surabaya. *Jurnal Dimensi Pendidikan dan Pembelajaran*, 5(1), 1–9.
- Pratiwi, L. T., Maghfiroh, M. N., Andika, D. S., Marcela, I. N., & Afifah, A. F. (2022). Permasalahan yang Dihadapi dalam Pelaksanaan Sekolah Inklusi di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Dasar Flobamorata*, 3(2), 314–318.
- Putri, O. S., Artistia, P., Nurhaliza, N., & Andriani, O. (2024). Karakteristik dan Klasifikasi Anak Berkebutuhan Khusus Secara Mental Emosional dan Akademik. *SINKRON: Jurnal Pengabdian Masyarakat UIKA Jaya*, 2(1), 100–111.
- Rahmah, F. N. (2018). Problematika Anak Tunarungu dan Cara Mengatasinya. *Quality*, 6(1), 1–15.
- Rahmania, A. (2018). *Implementasi Kebijakan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi (Studi pada Pusat Studi dan Layanan Disabilitas Universitas Brawijaya)*. Universitas

Brawijaya.

- Rifki, M., Zannah, S. L., Aulia, N. P., Wijaya, S., & Aris, I. E. (2024). Sinergitas Mewujudkan Lingkungan Inklusifitas Berbasis Pendidikan Multikultural Kepada Anak Tunagrahita Ringan. *Jejak Pembelajaran: Jurnal Pengembangan Pendidikan*, 8(1).
- Romadhon, M., Marini, A., & Sumantri, M. S. (2021). Kebijakan Pendidikan Inklusi Sebuah Solusi di Sekolah Dasar. *Jurnal Elementaria Edukasia*, 4(1), 109–115.
- Salehuddin, S., Oruh, S., Agustang, A., & Maswati, R. (2023). Inklusi Pendidikan dan Dinamika Kebudayaan Lokal di Papua. *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(2), 1413–1424.
- Saputra, A. (2016). Kebijakan Pemerintah Terhadap Pendidikan Inklusif. *Golden Age: Jurnal Ilmiah Tumbuh Kembang Anak Usia Dini*, 1(3), 1–15.
- Sari, I. P., & Yendi, F. M. (2018). Peran Konselor dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa Disabilitas Fisik. *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling*, 3(3), 80–88.
- Sartica, D., & Ismanto, B. (2016). Evaluasi Penyelenggaraan Program Pendidikan Inklusif Di Kota Palangka Raya 1. *Kelola: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 3(1), 49–66.
- Sharma, U., Armstrong, A. C., Merumeru, L., Simi, J., & Yared, H. (2019). Addressing Barriers to Implementing Inclusive Education in the Pacific. *International Journal of Inclusive Education*, 23(1), 65–78.
- Simorangkir, M. R. R. (2022). Mengenal dan Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Penyelenggara Pendidikan Integrasi. *EPIC: Jurnal Pendidikan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 10–18.
- Sudarto, Z. (2016). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. *JP (Jurnal Pendidikan): Teori Dan Praktik*, 1(1), 97–106.
- Sulistiyadi, H. K. (2014). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Layanan Pendidikan Inklusif di Kabupaten Sidoarjo. *Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 2(1), 1–10.
- Sumarni, T., & Eko Supriyanto, S. H. (2013). *Integrasi Pelayanan Pembelajaran Inklusi di SD Negeri Sumberrejo Kecamatan Ngombol Kabupaten Purworejo*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Tanjung, R., Supriani, Y., Arifudin, O., & Ulfah, U. (2022). Manajemen Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi pada Lembaga Pendidikan Islam. *JIIP- Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 339–348.
- Tinggi, P. (2024). Mahasiswa Tunanetra di. *MAHASISWA TUNANETRA-Ditinjau dari Beberapa Konstruksi Psikologi*, 1.
- Widhi, M. T. W., Hakim, A. R., Wulansari, N. I., Solahuddin, M. I., & Admoko, S. (2021). Analisis Keterampilan Argumentasi Ilmiah Peserta Didik pada Model Pembelajaran Berbasis Toulmin's Argumentation Pattern (TAP) dalam Memahami Konsep Fisika Dengan Metode Library Research. *PENDIPA Journal of Science Education*, 5(1), 79–91.

- Widiastuti, N. L. G. K. (2020). Layanan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus dengan Gangguan Emosi dan Perilaku. *Indonesian Journal Of Educational Research and Review*, 3(2), 1-11.
- Wijaya, N. T. R. I. I. (2021). *Evaluasi Program Pendidikan Inklusif di SD Negeri 30 Palembang*. Universitas Negeri Jakarta.
- Windarsih, C. A., Jumiatin, D., Efrizal, E., Sumini, N., & Utami, L. O. (2017). Implementasi Pendidikan Anak Usia Dini Inklusif di Kota Cimahi Jawa Barat. *P2m Stkip Siliwangi*, 4(2), 7-11.